

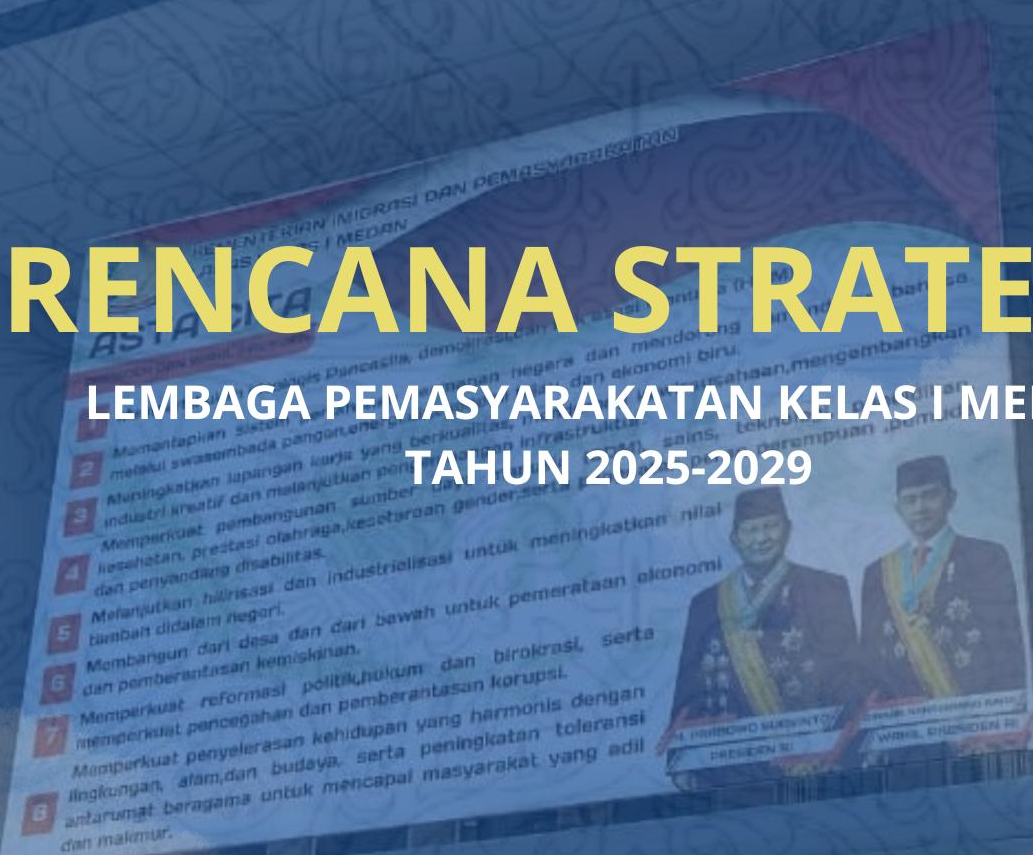


KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN



RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN
TAHUN 2025-2029



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN
"Pemasyarakatan PASTI BerManfaat Untuk Masyarakat"

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam Kebajikan, rahayu. Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman bagi Lapas Kelas I Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemsarakatan selama lima tahun ke depan. Renstra Lapas Kelas I Medan ini disusun selaras dengan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemsarakatan, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemsarakatan, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, seluruh jajaran Lapas Kelas I Medan diharapkan dapat bekerja secara profesional, akuntabel, bersinergi, transparan, dan berintegritas. Pelaksanaan Renstra ini menekankan pentingnya peningkatan kinerja pelayanan pemsarakatan, optimalisasi pembinaan narapidana, penguatan keamanan dan ketertiban, serta perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung operasional pemsarakatan. Selain itu, Renstra ini diharapkan mampu memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mendorong transformasi digital dalam setiap aspek pelayanan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan Renstra ini. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 28 November 2025

Kepala Lembaga Pemsarakatan

Kelas I Medan

The image shows a circular official stamp in blue ink. The text around the perimeter of the stamp reads "KEPALA LEMBAGA PEMASARAKATAN KELAS I MEDAN". In the center of the stamp is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Fonika Affandi".

Fonika Affandi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	5
PENDAHULUAN.....	5
A. KONDISI UMUM	6
B. POTENSI PERMASALAHAN	25
BAB II.....	33
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO.....	33
A. VISI, MISI KEMENTERIAN DAN LEMBAGA	33
B. TUJUAN	38
C. SASARAN KEGIATAN	38
D. MANAJEMEN RISIKO.....	39
BAB III.....	43
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	43
A. TARGET KINERJA	43
B. KERANGKA PENDANAAN.....	44
BAB IV	50
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN	50
A. MONITORING	50
B. EVALUASI.....	51
C. PENGENDALIAN.....	52
BAB V	55
PENUTUP	55



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN



BAB I

RENCANA STRATEGIS



BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan selama lima tahun ke depan. Renstra ini menjadi bagian integral dari Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara serta selaras dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2025–2029. Dokumen ini juga mendukung arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan yang profesional, modern, dan berkeadilan. Secara umum, penyusunan Renstra Lapas Kelas I Medan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Seluruh proses perencanaan ini diharapkan mampu memberikan arah strategis bagi Lapas Kelas I Medan dalam meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan, memperkuat integritas, serta menjawab berbagai tantangan krusial yang dihadapi dalam pengelolaan warga binaan pemasyarakatan.

Indonesia saat ini tengah berada dalam fase percepatan pembangunan menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Dalam kerangka tersebut, pembangunan hukum nasional menjadi salah satu pilar strategis yang menuntut hadirnya sistem pemasyarakatan yang efektif, humanis, serta berbasis pemenuhan hak asasi manusia. Reformasi sistem pemasyarakatan tidak hanya menyentuh aspek pembinaan narapidana, tetapi juga mencakup penguatan keamanan dan ketertiban, perbaikan tata kelola layanan publik, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung efisiensi operasional. Dalam konteks wilayah Sumatera Utara, khususnya di daerah Medan, Lapas Kelas I Medan menghadapi tantangan kompleks yang membutuhkan penanganan komprehensif. Tantangan tersebut antara lain tingginya tingkat hunian warga binaan, risiko gangguan keamanan dan ketertiban, penyalahgunaan handphone dan narkoba, keterbatasan sarana prasarana, serta perlunya peningkatan kualitas pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Di sisi lain, perubahan karakteristik tindak pidana, dinamika

sosial, dan tuntutan Masyarakat terhadap layanan publik menuntut institusi pemasyarakatan untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kompetensi.

Masalah overkapasitas menjadi salah satu persoalan besar yang mempengaruhi banyak aspek layanan, mulai dari kesehatan, keamanan, ruang pembinaan, hingga efektivitas program reintegrasi. Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya inovasi program pembinaan, penguatan kerja sama lintas sektor, dan transformasi digital untuk memastikan pembinaan berjalan optimal di tengah berbagai keterbatasan.

Renstra ini juga menjadi bagian dari upaya *continuous improvement* Lapas Kelas I Medan dalam mewujudkan tata kelola pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan adanya Renstra 2025–2029, diharapkan seluruh jajaran Lapas Kelas I Medan memiliki arah kebijakan yang jelas dan terukur dalam mendukung pencapaian sasaran pemasyarakatan di tingkat wilayah maupun Nasional.

A. KONDISI UMUM

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang memiliki mandat strategis dalam menyelenggarakan pelayanan, pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan bagi narapidana serta tahanan. Sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan nasional, Lapas Kelas I Medan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan, namun juga memastikan terlaksananya pembinaan kepribadian dan kemandirian yang berkesinambungan, sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan yang humanis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan berbasis pada nilai-nilai keadilan restoratif.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lapas Kelas I Medan senantiasa berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik melalui pendekatan berbasis HAM (*Human Rights-Based Approach*), profesionalitas dan integritas aparatur, penguatan tata kelola kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung efisiensi dan transparansi. Lapas Kelas I Medan juga dituntut untuk mampu merespons dinamika lingkungan strategis, termasuk pertumbuhan populasi warga binaan, perubahan regulasi, kompleksitas tantangan keamanan, serta tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, akuntabel, dan adaptif.

Sebagai institusi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan kelompok rentan, Lapas Kelas I Medan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial di tingkat lokal maupun nasional melalui penyelenggaraan program pembinaan yang efektif. Lapas Kelas I Medan diharapkan tidak hanya menjadi tempat menjalani pidana, tetapi juga berfungsi sebagai pusat rehabilitasi, reintegrasi, serta pemberdayaan yang mempersiapkan warga binaan untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan taat hukum. Oleh karena itu, reformasi pemasyarakatan di tingkat UPT, termasuk di Lapas Kelas I Medan, menjadi bagian penting dari agenda transformasi kelembagaan yang berdampak langsung pada kualitas layanan dan keberhasilan pembinaan narapidana.

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Lapas Kelas I Medan terdiri dari beberapa unit kerja yang masing-masing memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan. Secara umum, struktur organisasi terdiri dari:

a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Kepala Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pemasyarakatan yang meliputi pembinaan, pengamanan, pelayanan, dan administrasi. Kepala Lapas memastikan seluruh program berjalan sesuai standar operasional, regulasi, dan prinsip-prinsip pemasyarakatan berbasis HAM, serta mengawasi pelaksanaan tugas setiap unit kerja. Selain itu, Kepala Lapas melakukan pembinaan pegawai, menetapkan kebijakan teknis, melakukan evaluasi kinerja, dan menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

b. Kepala Bagian Tata Usaha

Kepala Bagian Tata Usaha memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan administratif bagi seluruh unit kerja di lingkungan Lapas. Ruang lingkup tugas meliputi pengelolaan tata persuratan, perlengkapan, pengurusan perjalanan dinas, pengelolaan anggaran dan keuangan, serta pembinaan kepegawaian seperti kenaikan

pangkat, disiplin pegawai, dan pengelolaan data SDM. Unit ini juga memastikan tersedianya dukungan administrasi, sarana prasarana, serta layanan kesekretariatan sehingga pelaksanaan program pemasyarakatan dapat berjalan secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Subbagian Tata Usaha terdiri dari Kepala Urusan Umum serta Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan.

- c. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)
Kesatuan Pengamanan Lapas memiliki tugas menyelenggarakan seluruh kegiatan pengamanan dan pengendalian keamanan di lingkungan Lapas. KPLP memimpin, mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan pengamanan rutin dan insidental, termasuk kontrol keliling, pengawasan pintu utama (P2U), pemeriksaan barang dan orang, serta pengamanan perimeter dan blok hunian. KPLP bertanggung jawab dalam menerapkan sistem deteksi dini gangguan keamanan melalui pemantauan situasi, identifikasi risiko, pengumpulan informasi, dan penanganan potensi kerawanan. Selain itu, KPLP menegakkan tata tertib, melakukan Tindakan preventif dan represif secara terukur, serta menangani insiden seperti keributan, pelarian, atau gangguan kamtib lainnya. KPLP juga mengoordinasikan regu jaga, memastikan kesiapsiagaan petugas, serta menyelenggarakan pelatihan pengamanan. Semua fungsi tersebut dilaksanakan dengan prinsip profesional, humanis, dan berorientasi pada keselamatan petugas serta warga binaan. Kesatuan Pengamanan Lapas terdiri dari Kepala KPLP yang membawahi anggota regu jaga sebagai pelaksana tugas pengamanan pada setiap regu dan shift.

- d. Kepala Bidang Pembinaan
Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik melaksanakan seluruh proses pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Tugasnya meliputi pelayanan registrasi mulai dari penerimaan, pendataan, penempatan, penghitungan masa pidana, hingga pengelolaan hak-hak integrasi. Selain itu, seksi ini juga

menyelenggarakan program pembinaan mental, sosial, rohani, kesehatan, psikologi, serta kegiatan perawatan bagi warga binaan. Fungsi bimbingan kemasyarakatan berperan mempersiapkan reintegrasi sosial, termasuk koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan, lembaga pemerintah daerah, dan keluarga. Secara keseluruhan, unit ini bertanggung jawab memastikan proses pembinaan berlangsung terarah, manusiawi, dan sejalan dengan prinsip pemasyarakatan. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik terdiri dari Subseksi Registrasi serta Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.

e. Kepala Bidang Kegiatan Kerja

Seksi Kegiatan Kerja bertugas merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan program pembinaan kemandirian melalui kegiatan pelatihan kerja, produksi, dan kegiatan industri pemasyarakatan. Unit ini menyelenggarakan berbagai pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar kerja serta memastikan warga binaan memperoleh kompetensi yang dapat digunakan setelah bebas. Selain itu, seksi ini bertanggung jawab dalam pengelolaan hasil kerja dan pemasaran produk WBP, termasuk membangun kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Subseksi Sarana Kerja mengelola fasilitas kerja, bengkel, peralatan, serta memastikan keselamatan dan kelayakan sarana produksi. Melalui unit ini, Lapas berupaya meningkatkan produktivitas WBP serta mendorong kemandirian ekonomi lembaga. Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja serta Subseksi Sarana Kerja.

f. Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban

Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban memegang peran vital dalam menjaga stabilitas keamanan di dalam Lapas. Tugas unit ini mencakup penyusunan rencana pengamanan, pengawasan kegiatan harian WBP, pelaksanaan kontrol blok hunian, deteksi dini gangguan kamtib, serta penegakan tata tertib. Adapun Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib mengelola administrasi keamanan, dokumentasi laporan

harian, pelanggaran, penindakan disiplin, dan pelaporan kepada pimpinan serta Kantor Wilayah. Seksi ini memastikan terciptanya situasi aman, tertib, dan kondusif melalui pendekatan profesional, humanis, dan berlandaskan standar operasional pemasyarakatan. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban terdiri dari Subseksi Keamanan serta Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib.

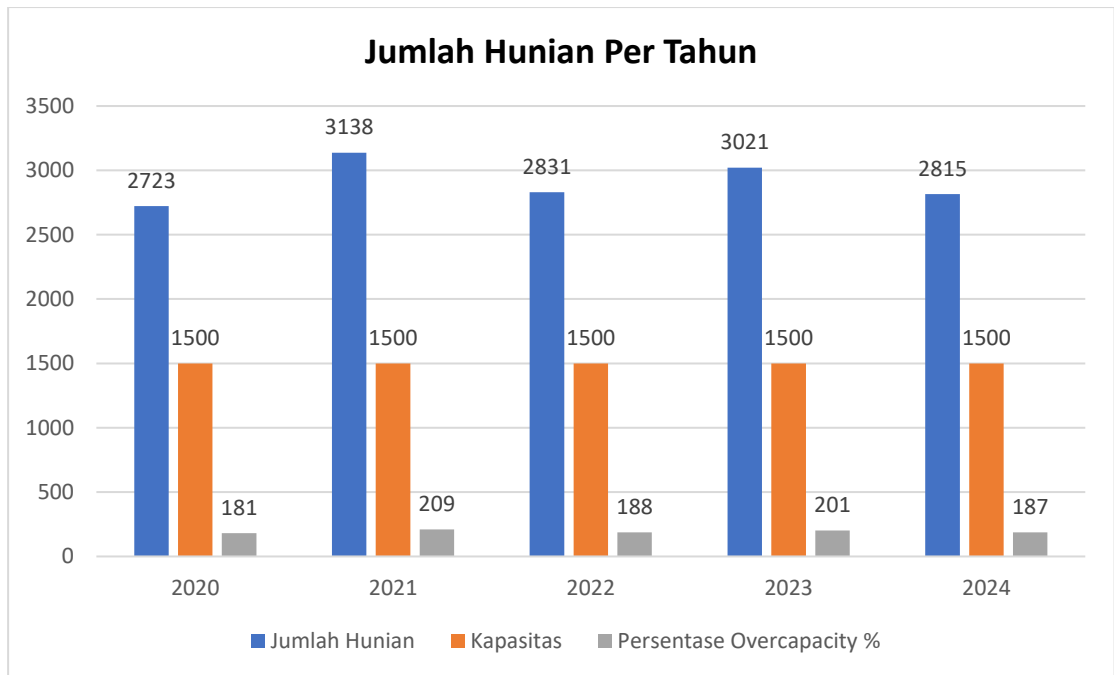
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional melaksanakan tugas sesuai keahlian masing-masing dalam mendukung kinerja pemasyarakatan. Jabatan fungsional terdiri dari Dokter, Perawat, dan Pembina Keamanan Pemasyarakatan. Pertumbuhan Jumlah Hunian Pemasyarakatan Tahun 2020 – 2024

2. Pertumbuhan Jumlah Hunian Tahun 2020 – 2024

Dalam kurun lima tahun terakhir, Lapas Kelas I Medan menghadapi pertumbuhan populasi WBP yang fluktuatif namun cenderung meningkat meskipun belum signifikan. Kondisi tersebut berdampak pada tingkat hunian yang melampaui kapasitas ideal, sehingga memerlukan langkah-langkah pengelolaan hunian yang lebih adaptif, penguatan deteksi dini, serta optimalisasi pembinaan.

Secara umum tren pertumbuhan WBP di Lapas Kelas I Medan pada 2020–2024 menunjukkan kecenderungan penurunan dan peningkatan yang tidak stabil. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 dan 2021, Lapas Kelas I Medan melaksanakan Renovasi dan Pembangunan gedung/blok baru sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan di mutasikan ke UPT lain. Namun, dengan grafik diatas juga berdampak pada kebutuhan sarana prasarana, penambahan petugas pengamanan, dan penguatan kegiatan pembinaan. Dengan bertambahnya populasi WBP, tantangan yang dihadapi meliputi meningkatnya risiko gangguan keamanan, kebutuhan layanan kesehatan yang lebih besar, serta beban administrasi dan pembinaan yang semakin tinggi.



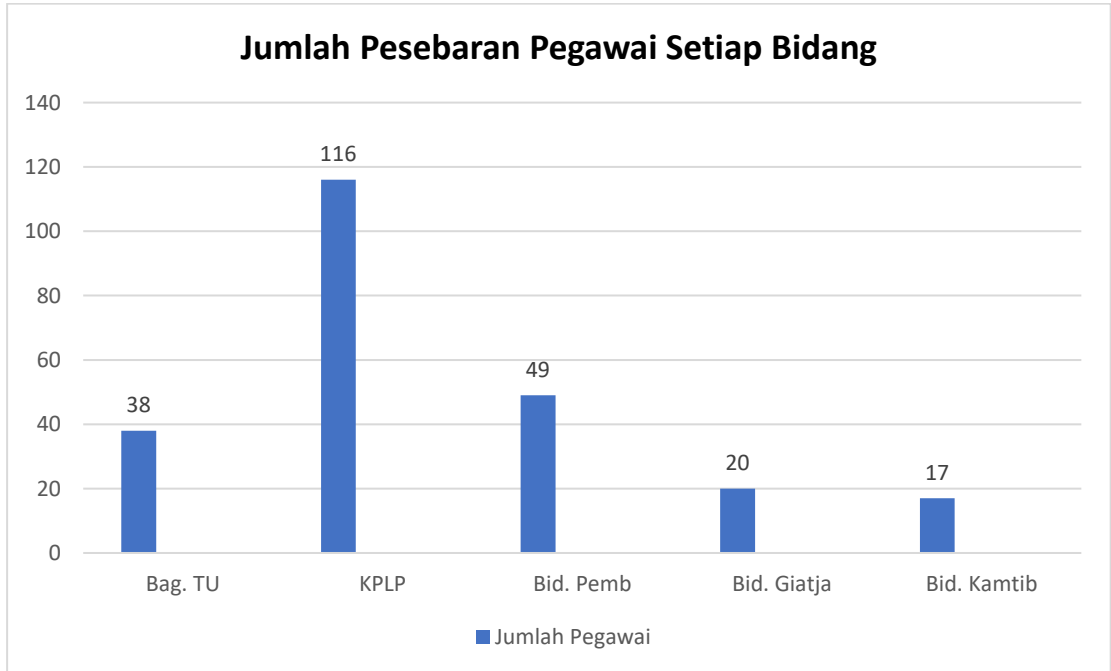
Tahun	Jumlah Hunian	Kapasitas	Persentase Overcapacity
2020	2723	1500	181,53%
2021	3138	1500	209,2%
2022	2831	1500	188,73%
2023	3021	1500	201,4%
2024	2815	1500	187,66%

3. Data Pegawai

Jumlah pegawai Lapas Kelas I Medan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola yang relatif stabil, namun belum sepenuhnya sebanding dengan peningkatan jumlah WBP. Komposisi pegawai terdiri dari pejabat struktural, petugas pengamanan, pejabat fungsional tertentu, serta staf pelaksana pada unit-unit teknis dan administrasi.

Pangkat/Golongan	Pendidikan						TOTAL
	S-3	S-2	S-1	D-IV	D-III	SLTA	
(IV/d)	1						1
(IV/c)		1	4				5
(IV/b)		1					1
(IV/a)		6					6
(III/d)		2	29			2	33
(III/c)		1	19		1		21
(III/b)		2	16			3	21
(III/a)			11	3	1	7	22
(II/d)						14	14

(II/c)					1	3	4
(II/b)						83	83
(II/a)						29	29
TOTAL	1	13	79	3	3	141	240



Ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas dibandingkan beban kerja, terutama pada fungsi pengamanan dan pembinaan, menjadi salah satu tantangan utama dalam menjamin pelayanan yang optimal. Di samping itu, variasi kompetensi pegawai juga perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan, pengembangan kompetensi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengurangi beban kerja manual. Dengan meningkatnya tuntutan reformasi pemasyarakatan, keberadaan pegawai dengan kompetensi digital, kemampuan deteksi dini, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip HAM menjadi sangat penting untuk mendukung tata kelola pemasyarakatan yang profesional dan akuntabel.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pancur Batu merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pembinaan, pelayanan, dan pengamanan. Ketersediaan fasilitas yang memadai menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas

operasional, memenuhi standar layanan publik, serta meningkatkan kualitas pembinaan narapidana. Kondisi sarana dan prasarana saat ini secara umum masih berfungsi dengan baik, namun beberapa bangunan memerlukan pemeliharaan berkala, peningkatan kapasitas, dan modernisasi untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah WBP serta tuntutan layanan berbasis teknologi.

Berikut merupakan daftar sarana dan prasarana yang dimiliki Lapas Kelas I Medan, antara lain:

Sarana & Prasarana Berupa Gedung Bangunan		
No	Nama Bangunan	Fungsi
1	Gedung Kantor Permanen	Tempat kegiatan administrasi lapas
2	Gedung Kantor Permanen	Tempat kegiatan administrasi lapas
3	Tempat Ibadah (Masjid)	Tempat pelaksanaan ibadah wbp khususnya yang beragama Islam
4	Tempat Ibadah (Gereja)	Tempat pelaksanaan ibadah wbp khususnya yang beragama Kristen
5	Tempat Ibadah (Vihara)	Tempat pelaksanaan ibadah wbp khususnya yang beragama Buddha
6	Blok Hunian	Hunian WBP
7	Blok Hunian	Hunian WBP
8	Blok Hunian	Hunian WBP
9	Blok Hunian	Hunian WBP
10	Blok Hunian	Hunian WBP
11	Blok Hunian	Hunian WBP
12	Blok Hunian	Hunian WBP
13	Gedung LP Lainnya	-

Sarana & Prasarana Berupa Rumah Negara		
No	Nama Bangunan	Jumlah
1	Rumah Susun Permanen	1
2	Rumah Khusus	10

Sarana & Prasarana Berupa Kendaraan Bermotor		
No	Nama Kendaraan	Jumlah
1	Micro Bus	2
2	Mini Bus	1
3	Mobil Ambulance	1

Sarana & Prasarana Berupa Peralatan TIK		
No	Nama Sarana Prasarana	Jumlah
1	P.C. Unit	43
2	Laptop	12
3	Personal Komputer Lainnya	10
4	Hard Disk	3
5	Peralatan Mainframe Lainnya	1
6	Computer Compatible	5
7	Peralatan Mini Komputer Lainnya	1
8	Printer	25
9	Scanner	2
10	Peralatan Personal Komputer Lainnya	13
11	Server	2
12	Router	1
13	Hub	1
14	Switch	5
15	Rackmount	1
16	KVM Keyboard Video Monitor	1
17	Ethernet Converter	3
18	Peralatan Jaringan Lainnya	1
19	Laptop Case	8
20	Peralatan Komputer Lainnya	1

Sarana & Prasarana Keamanan & Ketertiban		
No	Nama Sarana Prasarana	Jumlah
1	Pistol	32
2	Senapan Grendel (Bold Action Fidle)	23
3	Senjata Bahu / Senjata Laras Panjang	6
4	Tabung Pemadam Api	6
5	CCTV	17
6	Alat Detektor Barang Terlarang / X Ray	2
7	Metal Hand Detector	13
8	Penangkal Petir	1
9	Alat Sidik Jari	24
10	Sirine	1
11	Lonceng / Genta	5
12	Lampu Emergency	25
13	Handy Talky	78
14	Alat Khusus Keamanan Lainnya	10
15	Alat Khusus Penindak Huru-Hara	11
16	Jammer	10
17	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	3
18	Anti Riot Shield / Tameng PHH	10
19	Anti Riot Uniform / Rompi PHH	10
20	Helm Dalmas	25
21	Flash Ball	9
22	Rompi Anti Peluru	15
23	Fireman's Axe	2
24	Tes Kit Narkoba	1
25	Alat Deteksi Lainnya	1
26	Baju Anti Panas	2
27	Masker gas	2
28	Helmet	2
29	Sepatu Boot	2

30	Sepatu Lapangan Lainnya	10
31	Alat Pelindung Lainnya	2
32	Sarung Tangan	2
33	Walk Through Metal Detector	1
34	Lemari Besi Metal	3

Sarana & Prasarana Pembinaan Kemandirian		
No	Nama Sarana Prasarana	Jumlah
1	Peralatan Coffeshop	1 Set
2	Peralatan Bengkel Kayu	1 Set
3	Peralatan Las	1 Set
4	Peralatan Barbershop	1 Set
5	Peralatan Bakery	1 Set
6	Peralatan Perkebunan dan Perikanan	1 Set

Sarana & Prasarana Pembinaan Kepribadian		
No	Nama Sarana Prasarana	Jumlah
1	Rehabilitasi Pemasarakatan	1 Set
3	Lapangan Bola Futsal, Voli	1 Set
4	Klinik Pratama	1 Set
5	Perpustakaan	1 Set
6	Kesenian	1 Set
7	Peralatan Olahraga	1 Set

Sarana & Prasarana Kesehatan		
No	Nama Sarana Prasarana	Jumlah
1	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	8
2	Tensimeter	8
3	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	3
4	Tabung O2	4
5	Brancard	1

6	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	9
7	Lemari Obat (Kaca)	2
8	Resusitasi Dewasa	1
9	Kursi Dorong	2
10	Suction Pump	1
11	Standar Infus	7
12	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	4
13	Senter (Alat Kedokteran Umum)	12
14	Dental Chair	1
15	Dental Unit	1
16	Dental Hand Instruments Set	1
17	Oxygen Regulator	2
18	Sterelisateur For Instrument Portable	1
19	Nebulizer	2
20	CT Scanner	1
21	Patient Strecher	2
22	Alat Kedokteran Lainnya	2
23	Tandu	2
24	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	2
25	Alat Rx Radio UHF	1
26	Network Monitoring System	1
27	Sterilisator	1
28	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15

Keberadaan sarana dan prasarana tersebut menunjukkan bahwa Lapas Kelas I Medan telah memiliki fasilitas dasar yang mendukung pelaksanaan fungsi pemasyarakatan. Namun, pertumbuhan jumlah WBP, tuntutan peningkatan kualitas layanan publik, serta kebutuhan penguatan keamanan memerlukan kebijakan pengembangan sarana prasarana secara bertahap dan berkelanjutan pada periode 2025-2029.

5. Program dan Layanan

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan secara efektif, Lapas Kelas I Medan melaksanakan berbagai program pembinaan, pelayanan, dan pengamanan yang terstruktur, berkelanjutan, serta berorientasi pada pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Seluruh program dan kegiatan ini dirancang untuk mendukung tujuan strategis pemasyarakatan, yaitu mewujudkan pembinaan yang humanis, meningkatkan kemandirian, memperkuat reintegrasi sosial, serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Lapas secara optimal. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini juga memperhatikan regulasi nasional, standar operasional prosedur, aspirasi masyarakat, serta evaluasi kinerja periode sebelumnya, sehingga diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan publik di bidang pemasyarakatan. Dengan demikian, program dan kegiatan Lapas Kelas I Medan tidak hanya berfokus pada aspek pembinaan, tetapi juga meliputi aspek kesehatan, keamanan, dan dukungan sosial yang menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan modern.

Adapun program dan kegiatan Lapas Kelas I Medan sebagai berikut:

a) Pembinaan Kepribadian

No	Program/Kegiatan	Uraian Singkat
1	Kerohanian	Pembinaan kesadaran beragama bagi WBP beragama Islam, Kristen, Hindu dan Buddha
2	Jasmani	Pemeliharaan kesehatan jasmani WBP
3	Berbangsa dan Bernegara	Penanaman nilai kebangsaan dan Meningkatkan pemahaman hukum
4	Intelektual	Pengembangan wawasan dan literasi

b) Pembinaan kemandirian

No	Program/Kegiatan	Uraian Singkat
1	Produksi Roti	Pelatihan dan praktik kerja membuat kue
2	Budidaya Bonsai	Pelatihan membuat pohon mini / bonsai
3	Body Repair	Pelatihan mengecat kendaraan

4	Hidroponik dan Jamur Tiram	Pelatihan budidaya sayuran hidroponik
5	Budidaya Unggas Ayam dan Bebek	Pelatihan budidaya hewan ternak berupa unggas
6	Sablon, Handycraft	Pelatihan keterampilan menyablon dan karya tangan
7	Pangkas	Pelatihan potong rambut
8	Menjahit	Pelatihan menjahit pakaian
9	Pembuatan Tas	Pelatihan membuat tas
10	Budidaya Ikan	Pelatihan budidaya ikan air tawar
11	Mekanik	Pelatihan memperbaiki kendaraan

c) Pembinaan Reintegrasi Sosial

No	Program/Kegiatan	Uraian Singkat
1	Program Reintegrasi Sosial	Pemulihan hubungan sosial bagi WBP

d) Layanan Kesehatan

No	Program/Kegiatan	Uraian Singkat
1	Layanan Promotif	Edukasi kesehatan preventif
2	Layanan Preventif	Pencegahan masalah kesehatan
3	Layanan Kuratif	Pengobatan dan perawatan medis
4	Rehabilitatif	Pemulihan fungsi sosial
5	Pemenuhan Standar Klinik	Pemenuhan standar layanan klinik

e) Keamanan dan Ketertiban

No	Program/Kegiatan	Uraian Singkat
1	Penggeledahan / Razia Rutin	Mencegah gangguan kamtib
2	Penjagaan & Pengawasan	Menjaga keamanan kegiatan luar blok
3	Penindakan Pelanggaran	Penanganan perilaku menyimpang
4	Komitmen 3+1	Implementasi kunci pemasyarakatan
5	Unit Pengendali Gratifikasi	Pencegahan gratifikasi
6	Pakta Integritas HALINAR	Pencegahan HP, pungli, narkoba

f) Program Layanan Kemasyarakatan

No	Program/Kegiatan	Uraian Singkat
1	Hak Integrasi & Asimilasi	Pemberian hak integrasi sesuai regulasi
2	Pemberian Makanan Layak	Pemenuhan standar gizi
3	Layanan Disabilitas	Pelayanan inklusif
4	Layanan Kunjungan	Pelayanan tatap muka
5	Layanan Pengaduan	Akses penyampaian keluhan
6	Layanan Informasi	Transparansi layanan
7	Sidang TPP	Penentuan program pembinaan WBP
8	Dapur Higienis	Peningkatan standar layanan makanan

6. Capaian Renstra tahun 2020-2024

Sebagai bagian dari penyusunan Renstra 2025–2029, telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada Renstra 2020–2024. Secara umum, pelaksanaan tugas pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik, ditandai dengan stabilnya layanan registrasi, pembinaan, pengamanan, pelayanan kesehatan, serta pelaksanaan kegiatan kerja WBP. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan perhatian, antara lain keterbatasan sarana prasarana, kebutuhan penguatan SDM pada fungsi keamanan dan pembinaan, serta tantangan modernisasi layanan publik.

CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
			Target	realisasi	Capaian	Target	realisasi	Capaian	Target	realisasi	Capaian	Target	realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak sesuai dengan standar	65%	100%	153%	71%	100%	140%	80%	100%	125%	85%	100%	117%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	90%	100%	111%	92%	100%	108%	93%	100%	108%	94%	100%	106%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	50%	100%	200%	60%	100%	166%	70%	100%	143%	80%	100%	125%
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai Standar	70%	100%	142%	75%	100%	133%	80%	100%	125%	85%	100%	117%
		5. Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	70%	100%	142%	75%	100%	133%	80%	100%	125%	85%	100%	117%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	100%	166%	60%	100%	166%	70%	100%	143%	80%	100%	125%
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/korban penyalahgunaan Narkotika	22%	100%	454%	23%	100%	434%	24%	100%	416%	25%	100%	400%
2	Meningkatnya Pelayanan Kepribadian Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	55%	100%	181%	60%	100%	166%	65%	100%	153%	70%	100%	142%

		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	96%	100%	104%	97%	100%	103%	98%	100%	102%	98%	100%	102%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	-	-	-	-	-	-	80%	100%	125%	80%	100%	125%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan pendidikan	-	-	-	-	-	-	80%	100%	125%	80%	100%	125%
		5. Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	12%	100%	833%	13%	100%	769%	14%	100%	714%	15%	100%	666%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	-	-	-	-	-	-	28%	100%	357%	28%	100%	357%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	-	-	-	-	-	-	67%	100%	149%	67%	100%	149%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	70%	100%	142%	75%	100%	133%	80%	100%	125%	85%	100%	117%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat Dicegah	50%	100%	200%	60%	100%	165%	70%	100%	142%	80%	100%	125%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	70%	100%	142%	75%	100%	133%	80%	100%	125%	85%	100%	117%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	50%	100%	200%	60%	100%	165%	70%	100%	142%	80%	100%	125%
4	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	100%
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	100%
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai Pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	100%	100%
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat Waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%

		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100%
--	--	-------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85%	100%	117%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	100%	105%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	100%	111%
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai Standar	90%	100%	111%
		5. Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	111%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90%	100%	111%
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/korban penyalahgunaan Narkotika	8%	100%	1250%
		8. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%	100%	400%
2	Meningkatnya Pelayanan Kepribadian Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75%	100%	133%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	100%	100%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100%	100%	100%
		4. Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar,Patuh dan Disiplin	75%	100%	133%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	34%	100%	294%
		6. Persentase narapidana yang bekerja	55%	100%	181%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	100%	111%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat Dicegah	90%	100%	111%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	90%	100%	111%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%	100%	111%
4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%	100%	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1	3,9	125%

B. POTENSI PERMASALAHAN

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Lapas Kelas I Medan Tahun 2025-2029, diperlukan analisis komprehensif terhadap kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja penyelenggaraan pemasyarakatan. Identifikasi potensi serta permasalahan menjadi langkah penting untuk memahami kapasitas organisasi, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pembinaan, pengamanan, dan pemberdayaan warga binaan. Analisis ini dilakukan secara sistematis melalui pendekatan SWOT (*Strong, Weakness, Opportunities, dan Threats*) yang bertujuan memberikan gambaran objektif mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang melingkupi Lapas Kelas I Medan sebagai dasar dalam merumuskan isu strategis dan arah kebijakan pada periode perencanaan.

1. Potensi

Potensi berikut menggambarkan faktor internal dan eksternal yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas:

1) Potensi Sumber daya

- 1) Memiliki SDM dengan komposisi jabatan yang lengkap, mulai dari pejabat struktural, petugas pengamanan, hingga pegawai fungsional umum;
- 2) Peningkatan kapasitas pegawai berjalan secara rutin melalui pelatihan teknis, manajerial, dan pemasyarakatan;
- 3) SDM yang tersedia menjadi modal penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan pengamanan.

2) Potensi Sarana dan Prasarana

- 1) Tersedianya fasilitas operasional yang memadai, seperti blok hunian, pos jaga, ruang layanan publik, dapur, klinik pratama, ruang bimbingan, serta aula kegiatan;
- 2) Ketersediaan sarana pembinaan yang mendukung pelaksanaan kegiatan kepribadian dan kemandirian;
- 3) Infrastruktur fisik yang cukup lengkap menjadi penopang utama kelancaran tugas layanan, pembinaan, dan administrasi.

- 3) Potensi Regulasi dan Kemitraan
 - 1) Tersedia regulasi, SOP, dan pedoman teknis yang jelas sebagai dasar penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - 2) Memiliki jaringan kemitraan dengan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga sosial, dan organisasi keagamaan yang mendukung pelaksanaan pembinaan WBP;
 - 3) Kerja sama eksternal terus berkembang, membuka peluang peningkatan kualitas layanan dan program pembinaan.

- 4) Potensi Teknologi dan Informasi
 - 1) Penggunaan aplikasi pemasyarakatan dan sistem pengelolaan data WBP yang mulai terintegrasi;
 - 2) Penerapan digitalisasi layanan sebagai langkah awal modernisasi proses administrasi dan layanan publik;
 - 3) Pemanfaatan TI memberikan peluang percepatan layanan dan peningkatan akuntabilitas.

- 5) Potensi Aspirasi Masyarakat
 - 1) Tingginya aspirasi masyarakat terhadap layanan publik yang transparan dan berkualitas;
 - 2) Partisipasi masyarakat dan lembaga sosial memperkuat kegiatan pembinaan dan dukungan sosial bagi WBP;
 - 3) Harapan publik yang tinggi mendorong Lapas meningkatkan kualitas pelayanan serta pembangunan Zona Integritas.

2. Permasalahan

Permasalahan berikut menggambarkan hambatan internal dan faktor eksternal yang dapat memengaruhi kinerja Lapas:

- a) Permasalahan SDM
 - 1) Keterbatasan jumlah pegawai dibandingkan dengan rasio ideal terhadap jumlah WBP, terutama pada bidang pengamanan, bimbingan, dan pelayanan kesehatan;

- 2) Keterbatasan tenaga kesehatan dan minimnya tenaga paramedis, sehingga layanan kesehatan WBP belum memenuhi standar ideal.
- b) Permasalahan Sarana dan Prasarana
- 1) Overcrowding hunian WBP yang terus meningkat, mengakibatkan tekanan terhadap sarana pembinaan, kesehatan, dan keamanan;
 - 2) Kapasitas sarana pembinaan, ruang bimbingan, ruang keterampilan, serta fasilitas sosial-keagamaan yang belum optimal untuk kebutuhan seluruh WBP;
 - 3) Kondisi klinik pratama yang masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan secara komprehensif.
- c) Permasalahan Anggaran
- a) Keterbatasan anggaran operasional dan pemeliharaan, menyebabkan sejumlah sarana prasarana mengalami penurunan kualitas dan memerlukan renovasi atau modernisasi berkelanjutan.
- d) Permasalahan Keamanan dan Ketertiban
- a) Ancaman gangguan keamanan seperti penyelundupan barang terlarang, potensi pelarian, dan konflik antar-WBP yang memerlukan peningkatan kewaspadaan dan penguatan sistem pengamanan.
- e) Permasalahan teknologi Informasi
- a) Penggunaan teknologi informasi yang belum seragam di seluruh bagian, ditambah dengan kendala jaringan, keterbatasan perangkat, serta kebutuhan peningkatan kompetensi digital pegawai.
- f) Permasalahan Layanan Publik dan Aspirasi Masyarakat
- a) Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan, dan profesional, sehingga Lapas harus

meningkatkan standar pelayanan, fasilitas, dan kapasitas SDM untuk memenuhi ekspektasi tersebut.

- g) Permasalahan Risiko dan Mitigasi dan Bencana
- a) Risiko bencana kebakaran atau kerusakan instalasi listrik yang dapat mengganggu operasional Lapas;
 - b) Risiko bencana banjir, mengingat secara geografis Lapas Kelas I Medan berada di wilayah dataran rendah. Kondisi ini menuntut adanya rencana kontinjensi, jalur evakuasi yang jelas, koordinasi dengan BPBD, dan sistem peringatan dini untuk memastikan keselamatan WBP dan pegawai.

3. Analisis Potensi dan Permasalahan

	INTERNAL	EKSTERNAL
POTENSI	Sumber Daya (SDM & Anggaran)	Kemitraan dan Kolaborasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan sumber daya manusia dengan pengalaman dan kompetensi dasar dalam pelaksanaan tugas operasional dan administrative; • Adanya dukungan anggaran rutin yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan operasional tahunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan sektor swasta melalui kerja sama pembinaan serta pemberdayaan warga binaan; • Terdapat peluang perluasan kemitraan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan.
	Sarana dan Prasarana	Aspirasi dan Tuntutan Masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya bangunan, fasilitas penunjang, serta perlengkapan kerja yang menjadi dasar penyelenggaraan layanan pemasyarakatan; • Adanya rencana penguatan dan pengembangan sarana prasarana melalui program rehabilitasi dan peningkatan fasilitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan masyarakat terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan transparansi penyelenggaraan layanan pemasyarakatan; • Adanya harapan positif terhadap penguatan fungsi pembinaan dan reintegrasi sosial.
	Regulasi dan Tata Kelola	
<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya kerangka regulasi, pedoman operasional, dan standar prosedur yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan; 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur organisasi yang jelas dan sesuai ketentuan perundang-undangan. 	
	Teknologi Informasi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya perangkat teknologi informasi, jaringan internet, dan sistem aplikasi yang mendukung proses administrasi dan layanan masyarakat; • Mulainya penerapan digitalisasi dalam beberapa layanan internal. 	
PERMASALAHAN	Sumber Daya (SDM & Anggaran)	Kemitraan dan Kolaborasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pegawai tidak sebanding dengan kebutuhan ideal, terutama pada fungsi pengamanan, pembinaan, dan pelayanan kesehatan; • Keterbatasan anggaran operasional dan pemeliharaan yang berdampak pada keterlambatan perbaikan serta pengembangan sarana prasarana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama lintas lembaga belum berjalan optimal dan masih bersifat terbatas pada kegiatan tertentu.
	Sarana dan Prasarana	Aspirasi dan Tuntutan Masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi sebagian sarana prasarana mengalami penurunan kualitas sehingga memerlukan perbaikan atau modernisasi; • Lokasi Lapas Kelas I Medan yang berada di kawasan dataran rendah sehingga memungkinkan terjadinya bencana banjir 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik, termasuk kecepatan, akurasi, transparansi, dan kepastian prosedur, yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh kondisi eksisting.
	Regulasi dan Tata Kelola	
	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa prosedur operasional memerlukan penyesuaian lebih lanjut untuk mengakomodasi kebutuhan layanan modern dan perkembangan teknologi. 	
	Teknologi Informasi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kestabilan jaringan dan ketersediaan perangkat belum merata di seluruh unit kerja; • Kompetensi pegawai dalam pemanfaatan teknologi informasi masih perlu ditingkatkan. 	

4. Tantangan

Berdasarkan analisis permasalahan internal dan eksternal, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan menghadapi sejumlah tantangan strategis yang perlu dikelola secara sistematis dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan. Tantangan tantangan tersebut meliputi:

- a) Pengendalian Overcrowding Hunian WBP Tantangan utama adalah menekan tingkat kelebihan hunian yang berdampak langsung terhadap berbagai aspek layanan, termasuk kualitas pembinaan, kesehatan, keamanan, dan pengelolaan sarana. Upaya yang diperlukan mencakup optimalisasi manajemen hunian, pemanfaatan program integrasi, kerja sama dengan aparat penegak hukum, serta peningkatan kapasitas blok hunian;
- b) Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Sesuai Standar Rasio Ideal Keterbatasan jumlah pegawai, terutama pada bidang pengamanan, kesehatan, dan pembimbingan, menjadi tantangan dalam memastikan pelaksanaan tugas yang efektif. Diperlukan strategi rekrutmen, redistribusi pegawai, peningkatan kompetensi, serta penguatan manajemen kinerja;
- c) Optimalisasi Pengelolaan Anggaran dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Keterbatasan anggaran operasional dan pemeliharaan menyebabkan beberapa sarana tidak dapat berfungsi optimal. Tantangan ini menuntut inovasi dalam perencanaan, efisiensi belanja, kolaborasi pendanaan, serta prioritas peningkatan dan modernisasi sarana prasarana;
- d) Peningkatan Kapasitas Sarana Pembinaan dan Layanan WBP Ruang pembinaan yang terbatas mempengaruhi pelaksanaan program bimbingan, kegiatan keterampilan, dan kegiatan sosial-keagamaan. Diperlukan upaya pengembangan fasilitas pembinaan baik secara fisik maupun melalui kerja sama pihak ketiga;
- e) Penguatan Sistem Keamanan dan Penanggulangan Gangguan Kamtib Ancaman penyelundupan barang terlarang, potensi pelarian, serta konflik internal WBP masih menjadi tantangan signifikan. Penguatan pengawasan, peningkatan kemampuan petugas,

penggunaan teknologi keamanan, serta penegakan tata tertib menjadi kebutuhan mendesak;

- f) Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan bagi WBP Keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas klinik menimbulkan tantangan dalam pemenuhan layanan kesehatan sesuai standar. Diperlukan penguatan klinik pratama, kerja sama dengan fasilitas kesehatan luar, serta pengadaan tenaga medis tambahan;
- g) Pemerataan dan Penguatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Kendala jaringan, perangkat yang tidak mutakhir, serta kemampuan pegawai yang belum merata menghambat digitalisasi layanan. Tantangannya adalah menciptakan sistem TI yang handal, didukung pelatihan pegawai dan modernisasi perangkat;
- h) Peningkatan Kualitas Layanan Publik Sesuai Tuntutan Masyarakat Masyarakat menuntut layanan yang transparan, cepat, dan sesuai standar nasional. Hal ini menuntut inovasi layanan, penyederhanaan prosedur, peningkatan sarana pelayanan, dan penguatan Zona Integritas;
- i) Mitigasi Risiko Bencana, Termasuk Risiko Banjir Mengingat lokasi Lapas Kelas I Medan berada di wilayah dataran rendah, risiko banjir serta bencana lain seperti kebakaran dan kerusakan instalasi menjadi tantangan penting. Diperlukan sistem mitigasi, sarpras keselamatan, jalur evakuasi, serta peningkatan kesiapsiagaan petugas dan WBP.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN



BAB III

RENCANA STRATEGIS



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO

A. VISI, MISI KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

Visi didefinisikan sebagai gambaran umum keadaan yang ingin dicapai pada akhir dari periode perencanaan untuk menjelaskan kondisi kinerja 5 tahun mendatang sesuai dengan peran dan fungsi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut, maka diturunkan menjadi misi. Misi adalah rumusan umum atas Upaya yang akan dilaksanakan suatu organisasi untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan sesuai visi Kementerian/Lembaga yang bersifat unik terhadap K/L lain. Penjabaran Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan yang turut dilengkapi rencana sasaran nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah kementerian yang menangani masalah imigrasi serta pemasarakatan di Indonesia dengan tugas sebagai penyelenggara sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menyelaraskan Visi, Misi dan Tujuan sejalan dengan Visi Presiden dan wakil presiden.

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”

1. Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025–2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” menjadi dasar penyelarasan arah pembangunan nasional, termasuk di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Dalam mendukung visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menetapkan visi organisasi: “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan

Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan layanan publik yang transparan, modern, akuntabel, serta berorientasi pada stabilitas keamanan negara.

Penerapan visi tersebut menuntut transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi, sehingga tercipta tata kelola yang baik (*good governance*) dan meningkatkan kepercayaan publik. Aspek keadilan juga menjadi prinsip utama, yaitu 36 memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh masyarakat, WNA, WNI, tahanan, anak, dan warga binaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, modernisasi kelembagaan menjadi pilar penting melalui pemanfaatan teknologi informasi, integrasi sistem data, digitalisasi layanan, serta peningkatan efektivitas pengawasan dan pembinaan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan turut berupaya mengedepankan pelayanan yang humanis, adaptif, dan berintegritas, dengan melibatkan sinergi antarinstansi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan akademisi. Dalam lima tahun ke depan, orientasi kelembagaan diarahkan untuk menjadi institusi berkelas dunia (*world-class institution*) melalui transformasi organisasi, penguatan sumber daya manusia, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan standar layanan sesuai praktik terbaik internasional.

Penegakan hukum bidang keimigrasian dijalankan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, sementara fungsi pemasyarakatan difokuskan pada pembinaan dan pembimbingan warga binaan untuk mencapai reintegrasi sosial yang efektif. Seluruh upaya tersebut dilandasi oleh nilai-nilai PRIMA (*Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel*) sebagai fondasi perilaku aparatur. Dengan demikian, visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi pedoman strategis bagi Lapas Kelas I Medan dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, humanis, modern, serta mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

2. Nilai-Nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan telah menetapkan lambang resmi berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Logo tersebut mencerminkan dua peran utama Kementerian, yaitu sebagai guard (pelindung) dan guide (pembimbing), yang menjadi cerminan peran strategis lembaga dalam penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan. Sebagai pelindung, Kementerian menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan perbatasan, penegakan hukum keimigrasian, serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasarakatan untuk menciptakan rasa keadilan dan mendukung reintegrasi sosial Warga Binaan. Sedangkan sebagai pembimbing, Kementerian berperan mengarahkan masyarakat dan pelintas batas agar mematuhi peraturan keimigrasian, serta membimbing Warga Binaan agar mampu menghindari pengulangan tindak pidana dan kembali menjadi bagian produktif dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjadikan nilai-nilai utama PRIMA sebagai landasan budaya kerja, yang terdiri dari:

a) Profesional

Melaksanakan tugas berdasarkan kompetensi, keahlian, dan standar kerja yang berlaku, dengan pendekatan humanis serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam setiap layanan dan penegakan hukum;

b) Responsif

Memberikan layanan secara cepat, tepat, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, serta proaktif menjalin kolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas layanan dan penyelesaian masalah;

c) Integritas

Menjunjung tinggi kejujuran, etika, dan prinsip keadilan dalam setiap tindakan, serta menolak segala bentuk intervensi dan penyimpangan dalam proses penegakan hukum maupun pelayanan publik;

- d) Modern
Memanfaatkan teknologi informasi yang mutakhir secara transparan untuk mendukung pengawasan, pelayanan keimigrasian, pembinaan Warga Binaan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengamanan dan administrasi pemasyarakatan;
- e) Akuntabel
Menjalankan seluruh tugas dan fungsi secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai ketentuan hukum, sehingga setiap proses pelayanan dan penegakan hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa, dan negara.

3. Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024–2029 menetapkan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang dijabarkan ke dalam 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, serta 8 Program Hasil Terbaik Cepat. Delapan misi Asta Cita tersebut kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN), meliputi:

- a) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM;
- b) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta penguatan ekonomi kreatif, hijau, dan biru;
- c) Meningkatkan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur;
- d) Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, serta peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- e) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi;
- f) Membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan;
- g) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
- h) Memperkuat harmoni kehidupan dengan lingkungan, budaya, serta toleransi antarumat beragama.

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, sesuai tugas dan fungsinya serta hasil kesepakatan dengan Bappenas, berkontribusi langsung terhadap pencapaian Asta Cita 1 dan 7, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM; serta memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi termasuk pencegahan korupsi dan narkoba. Selain itu, Kementerian juga berkontribusi tidak langsung terhadap pencapaian Asta Cita 4 dan 8, sehingga mencerminkan komitmen kuat dalam mendukung Prioritas Nasional.

Berdasarkan dua Asta Cita utama tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menetapkan Misi 2025–2029 sebagai berikut:

- ***Misi 1, yaitu Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan, merupakan turunan dari Asta Cita 1.*** Dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan layanan yang transparan dan berkeadilan bagi WNI dan WNA, serta penegakan hukum keimigrasian yang meliputi pemberian dan penolakan izin masuk dan tinggal, penyelesaian pelanggaran, tindakan administratif keimigrasian, penyidikan hingga deportasi. Dalam konteks pemasarakatan, misi tersebut diterapkan melalui penyelenggaraan perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dari tahap pra-adjudikasi hingga pasca-adjudikasi, termasuk pendampingan, pengawasan, pemenuhan hak-hak dasar, serta pembinaan dan pembimbingan berdasarkan prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum.
- ***Misi 2, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas, merupakan turunan dari Asta Cita 7.*** Dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan melalui modernisasi dan digitalisasi layanan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, penyederhanaan prosedur, integrasi data, serta peningkatan kompetensi SDM yang profesional dan berintegritas. Dalam konteks pemasarakatan, misi ini ditujukan untuk mewujudkan sistem

pemasyarakatan yang modern dan terintegrasi melalui pelayanan, pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pengamanan, dan perawatan yang adil, tidak diskriminatif, serta mengedepankan asas kemanusiaan dan profesionalitas. Penguatan ini mencakup implementasi teknologi informasi dalam pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial yang lebih efektif dan transparan, didukung oleh SDM yang kompeten serta menjunjung nilai-nilai budaya kerja organisasi.

B. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menetapkan tujuan strategis yang menjadi arah Pembangunan organisasi untuk periode 2025–2029. Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai landasan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, sekaligus sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian secara berkelanjutan. Adapun tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial;
2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

C. SASARAN KEGIATAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta selaras dengan arah kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lapas Kelas I Medan menetapkan sasaran kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan pemasyarakatan. Sasaran kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lapas dalam bidang pembinaan, perawatan, bimbingan, dan pengamanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), serta memastikan terselenggaranya kegiatan yang strategis, terarah, dan berorientasi

pada hasil. Melalui implementasi kegiatan yang sistematis dan berorientasi hasil, Lapas Kelas I Medan berupaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, produktif, serta mendukung proses reintegrasi sosial WBP. Secara umum, sasaran kegiatan Lapas Kelas I Medan meliputi 4 SK (Sasaran Kegiatan) dan 11 IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) sebagai berikut:

KODE	SASARAN KEGIATAN	KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SK.1	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	IKK.1.1	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik
		IKK.1.2	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik
SK.2	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	IKK.2.1	Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen
		IKK.2.2	Indeks Pencegahan
		IKK.2.3	Indeks Penindakan
SK.3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	IKK.3.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik
		IKK.3.2	Persentase Satker Dengan Indeks Kesehatan Fisik Dengan Kategori Baik
		IKK.3.3	Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental
		IKK.3.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan
SK.4	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	IKK.4.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan
		IKK.4.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan sekretariat di UPT masing-masing

D. MANAJEMEN RISIKO

No	Indikator Risiko	Indikator Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah				
Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan				
1	Capaian pembinaan tidak mencapai target	Ketersediaan instruktur tidak memadai; jadwal pelatihan tidak disiplin; bahan pelatihan terlambat	GIATJA	Instruktur kompeten tersedia; kegiatan berjalan sesuai jadwal
2	Partisipasi WBP menurun	Sarpras pelatihan tidak memadai; minat peserta rendah; jadwal tumpang tindih	GIATJA	Partisipasi WBP meningkat $\geq 80\%$

3	Program tidak berjalan efektif	Evaluasi tidak rutin; komunikasi antar petugas rendah; perubahan jadwal mendadak	GIATJA	Kegiatan berjalan terjadwal dan dievaluasi
4	Evaluasi pembinaan tidak meningkat	Pembimbing rohani/psikolog terbatas; evaluasi tidak standar	PEMBINAAN	Pembimbingan rutin dan terdokumentasi
5	Partisipasi WBP menurun	Motivasi rendah; program monoton; ruang kegiatan terbatas	PEMBINAAN	Tingkat kehadiran meningkat
6	Penilaian tidak konsisten	SOP tidak dipahami; asesor tidak terlatih; form penilaian kurang jelas	PEMBINAAN	Penilaian sesuai SOP
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan				
1	Operasi intelijen tidak mencapai target	Minimnya informasi lapangan; tidak aktifnya jaringan eksternal	ADM. KAMTIB	LHA intelijen valid dan tepat waktu
2	Kualitas operasi tidak optimal	Sarpras intel terbatas; petugas kurang terlatih	ADM. KAMTIB	Sarpras optimal dan digunakan maksimal
3	Tindak lanjut lambat	Koordinasi lemah; SOP tindak cepat tidak diterapkan	ADM. KAMTIB	Tindak lanjut sesuai batas waktu
4	Indeks pencegahan tidak mencapai target	Sosialisasi tidak rutin; media edukasi minim	ADM. KAMTIB	Sosialisasi berjalan terjadwal
5	Langkah pencegahan tidak efektif	Pengawasan internal lemah; tidak ada peta risiko terbaru	ADM. KAMTIB	Pengawasan meningkat dan terdokumentasi
6	Potensi pelanggaran meningkat	Teknologi pendukung belum optimal; area rawan tidak terpantau	ADM. KAMTIB	Penurunan jumlah temuan pelanggaran
7	Penindakan tidak cepat	Kompetensi investigasi terbatas; sarpras tidak lengkap	ADM. KAMTIB	Penindakan dilakukan
8	Penindakan tidak tuntas	Bukti kurang lengkap; koordinasi antar seksi rendah	ADM. KAMTIB	Dokumen penindakan lengkap sesuai SOP
9	Penindakan tidak sesuai SOP	Petugas belum dilatih; supervisi lemah	ADM. KAMTIB	Kepatuhan SOP 100%
Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana				
1	Sanitasi lingkungan menurun	Petugas kebersihan kurang; sarpras rusak	PEMBINAAN	Petugas lengkap dan sanitasi terjaga
2	Kebersihan blok tidak terjaga	Overkapasitas; sarpras minim; kesadaran WBP rendah	PEMBINAAN	Sarpras kebersihan lengkap dan berfungsi
3	Risiko lingkungan meningkat	Drainase buruk; kelembaban tinggi; hama tidak terkendali	PEMBINAAN	Penataan lingkungan berjalan efektif
4	Kondisi fisik WBP menurun	Pemeriksaan kesehatan tidak rutin; keterbatasan tenaga medis	PEMBINAAN	Pemeriksaan rutin dan terjadwal
5	Kualitas makanan tidak sesuai standar	Keterbatasan bahan makanan; pengawasan distribusi lemah	PEMBINAAN	Menu sesuai standar gizi

6	Aktivitas fisik terbatas	Sarpras olahraga tidak memadai	PEMBINAAN	Sarpras tersedia dan digunakan optimal
7	Kasus kesehatan mental meningkat	Keterbatasan psikolog; beban kasus tinggi	PEMBINAAN	Layanan konseling berjalan rutin
8	WBP enggan mengikuti layanan	Stigma; kurang sosialisasi manfaat	PEMBINAAN	Partisipasi WBP meningkat
9	Proses layanan tidak efektif	Alur rujukan tidak jelas; tidak ada SOP	PEMBINAAN	SOP diterapkan konsisten
10	Pelayanan tidak sesuai standar	Tenaga medis terbatas; sarpras tidak lengkap	PEMBINAAN	Tenaga medis mencukupi dan kompeten
11	Waktu pelayanan lama	Sistem layanan belum optimal	PEMBINAAN	Waktu layanan lebih efisien
12	Komplain meningkat	Komunikasi buruk; kurangnya supervisi	PEMBINAAN	Komplain menurun
6172 - Program Dukungan Manajemen				
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan				
1	Target RB tidak tercapai	Monitoring lemah; tidak ada evaluasi berkala	TU	Monitoring sesuai jadwal
2	Laporan RB terlambat	Koordinasi unit lemah; keterlambatan input	TU	Laporan tepat waktu
3	Aksi RB tidak berjalan	Komitmen pelaksana rendah	TU	Seluruh aksi RB terlaksana
4	Tingkat kepuasan menurun	Respons lambat; ketidakkonsistenan layanan	TU	Respons sesuai standar waktu
5	Layanan tidak konsisten	SOP tidak dipahami; pelatihan kurang	TU	SOP dipatuhi dan tersosialisasi
6	Komplain meningkat	Komunikasi layanan tidak efektif	TU	Komplain menurun



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN



BAB III

RENCANA STRATEGIS



BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah menetapkan dua sasaran program utama sebagai arah pembangunan pemsarakatan nasional. Sasaran program tersebut menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai serta mencerminkan hasil (outcome) dari pelaksanaan berbagai kegiatan dan program pembinaan, pelayanan, pengamanan, serta dukungan manajerial di bidang pemsarakatan.

Target Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

SK	6710 – Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah (Program PPH)	TARGET				
IKK		2025	2026	2027	2028	2029
SK 1	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan					
IKK 14.1	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kemandirian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	40%	50%	60%	70%	80%
IKK 14.2	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Mendapatkan Predikat Sangat Baik	60%	65%	70%	75%	80%
6170.BDC.002 PEMBINAAN KEPRIKIBADIAN DAN LAYANAN INTEGRASI NARAPIDANA						
6170.BDC.006 PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA						
SK	6710 – Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah (Program PPH)	TARGET				
IKK		2025	2026	2027	2028	2029
SK 2	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan					
IKK.15.1	Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen	75%	80%	85%	90%	95%
IKK.15.2	Indeks Pencegahan	2,6	2,8	3	3,2	3,4
IKK.15.3	Indeks Penindakan	2,8	2,96	3,04	3,12	3,2
6170.BHB.002 OPERASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN						

SK	6710 – Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah (Program PPH)	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
SK 3	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana					
IKK.16.1	Persentase UPT Masyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%	20%	30%	40%	50%
IKK.16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%	22%	30%	37%	45%
IKK.16.3	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental	8%	10%	12%	14%	16%
IKK.16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Masyarakatan	80%	85%	90%	95%	100%
6170.BDC.004 KEBUTUHAN DASAR DAN LAYANAN KESEHATAN						
6170.BDC.007 PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI PEMASYARAKATAN						
SK	6710 – Penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah (Program PPH)	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
SK 4	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan					
IKK.19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%
IKK.19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Masyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55
6172.EBA.956 LAYANAN BMN						
6172.EBA.962 LAYANAN UMUM						
6172.EBA.994 LAYANAN PERKANTORAN						
6172.EBB.951 LAYANAN SARANA INTERNAL						
6172.EBB.971 LAYANAN PRASARANA INTERNAL						
6172.EBC.954 LAYANAN MANAJEMEN SDM						
6172.EBD.952 LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN						
6172.EBD.953 LAYANAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI						
6172.EBD.955 LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN						
6172.EBD.961 LAYANAN REFORMASI KINERJA						

B. KERANGKA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Lembaga Masyarakatan Kelas I Medan memerlukan dukungan

dari berbagai sumber daya yang dimiliki. Dukungan sumber daya dapat berasal dari SDM masyarakat yang unggul, sarana dan prasarana yang mumpuni, adanya dukungan regulasi, serta sumber pendanaan yang cukup. Dalam hal ini, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Lembaga Masyarakat Kelas I Medan sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

1. Kerangka Pendanaan Program TA. 2025

Kode	Program/Kegiatan	Pagu 2025
6170.BDC.002	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	87,948,000
6170.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	25,692,288,000
6170.BDC.006	Pembinaan Kemandirian Narapidana	245,120,000
6170.BDC.007	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial	40,286,000
6170.BHB.002	Operasi Keamanan dan Ketertiban	67,632,000
6172.EBA.956	Layanan BMN	8,926,000
6172.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	4,608,000
6172.EBA.962	Layanan Umum	13,809,000
6172.EBA.994	Layanan Perkantoran	18,862,902,000
6172.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	20,175,000
6172.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7,042,000
6172.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	7,131,000
6172.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	6,929,000
6172.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	7,536,000

2. Kerangka Pendanaan Program TA. 2026-2029

Kode	Program/Kegiatan	2026	2027	2028	2029
6170.BDC.002	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	0	87,948,000	87,948,000	87,948,000
6170.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	27,107,818,000	25,692,288,000	25,692,288,000	25,692,288,000
6170.BDC.006	Pembinaan Kemandirian Narapidana	0	245,120,000	245,120,000	245,120,000
6170.BDC.007	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial	0	40,286,000	40,286,000	40,286,000
6170.BHB.002	Operasi Keamanan dan Ketertiban	0	67,632,000	67,632,000	67,632,000
6172.EBA.956	Layanan BMN	0	8,926,000	8,926,000	8,926,000

6172.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	0	4,608,000	4,608,000	4,608,000
6172.EBA.962	Layanan Umum	0	13,809,000	13,809,000	13,809,000
6172.EBA.994	Layanan Perkantoran	30,629,122,000	18,862,902,000	18,862,902,000	18,862,902,000
6172.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	0	20,175,000	20,175,000	20,175,000
6172.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	0	7,042,000	7,042,000	7,042,000
6172.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	0	7,131,000	7,131,000	7,131,000
6172.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	0	6,929,000	6,929,000	6,929,000
6172.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	0	7,536,000	7,536,000	7,536,000

C. ROADMAP

Roadmap Lapas Kelas I Medan Tahun 2025–2029 disusun sebagai arah strategis dalam menguatkan penyelenggaraan pemasyarakatan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Dokumen ini memuat kerangka pengembangan yang berfokus pada enam aspek utama, yaitu sarana dan prasarana, barang milik negara (BMN) dan perangkat operasional, kerja sama, kelembagaan, sumber daya manusia, serta tata laksana. Setiap aspek dirancang untuk menjawab kebutuhan reformasi sistem pemasyarakatan, mulai dari peningkatan kualitas fasilitas dan operasional, penguatan kapasitas organisasi, pembangunan sistem kerja yang efisien, pengembangan kompetensi SDM, perluasan jaringan kolaborasi, hingga penyempurnaan tata kelola yang modern dan transparan. Melalui roadmap ini, Lapas Kelas I Medan menetapkan langkah transformasi jangka menengah yang terukur untuk memastikan seluruh fungsi pembinaan, pengamanan, dan pelayanan dapat berjalan optimal serta sejalan dengan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam periode 2025–2029.

No	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1	Sarana dan Prasarana	Renovasi Pagar dan Teras Kantor	Pengaspalan Halaman Lapas	Revitalisasi Drainase	Revitalisasi Instalasi jaringan internet	Revitalisasi Instalasi Listrik
		Pengecatan Atap dan Bangunan Lapas	Penataan Taman dan Area Hijau	Revitalisasi Instalasi Gedung Perkantoran	Renovasi Plafon dan Atap Bangunan	Revitalisasi Instalasi Area Blok Hunian
		Pembuatan Kanopi Parkiran	Pengadaan Broadcasting Center			
2	Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Opearsional	Penyusunan RK BMN 2027	Penyusunan RK BMN 2029	Penyusunan RK BMN 2030	Penyusunan RK BMN 2032	Penyusunan RK BMN 2034
		Likuidasi BMN	Penyusunan Daftar Barang Ruangan (DBR)	Pengadaan Perangkat TI Prioritas	Identifikasi Kebutuhan Pengnadaan Perangkat Komputer/TI	Identifikasi Kebutuhan Pengnadaan Perangkat Komputer/TI
		Penataan ruang penyimpanan BMN	Identifikasi BMN Rusak Berat	Identifikasi Kebutuhan Pengnadaan Perangkat Komputer/TI	Identifikasi Kebutuhan Pengnadaan Perangkat Komputer/TI	Pengadaan Pelengkapan Kantor
		Pemeriksaan awal kendaraan dinas	Usulan Penghapusan BMN		Pengadaan Ruang Komputasi	Pengadaan Ruang Karsipan
		Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Perangkat Komputer /TI	Elektronisasi sertifikat tanah			
3	Kerja Sama	Kerjasama dengan mitra di pembinaan kerohanian	Kerjasama dengan BPPD dibidang manajemen risiko bencana alam	Optimalisasi pemasaran produk kemandirian	Kerjasama dengan Mitra dibidang Rehabilitasi	Kerjasama dengan Mitra dibidang pendidikan
		Kerjasama dengan Puskesmas sebagai mitra dibidang kesehatan	Kerjasama dengan mitra guna sewa lahan lapas	Kersama dengan Mitra dibidang Keamanan dan ketertiban	Kerjasama dengan Puskesmas sebagai mitra dibidang kesehatan	Kerjasama dengan Puskesmas sebagai mitra dibidang kesehatan
		Kerjasama dengan mitra pengadaan Wartelsuspas	Kerjasama dengan mitra dibidang			

			pembinaan kemandirian			
4	Kelembagaan	Identifikasi kebutuhan awal pendaftaran NIB UMKM Lapas Kelas IIA Pancur Batu	Penguatan Pembangunan ZI WBBM	Evaluasi Pelayanan Publik	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja
		Pendaftaran koperasi Lapas Kelas IIA Pancur Batu ke Inkopasindo	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Reformasi Birokrasi	Evaluasi Reformasi Birokrasi	Evaluasi Reformasi Birokrasi
			Evaluasi Reformasi Birokrasi			
5	Sumber Daya Manusia	Penyusunan Daftar Pegawai Usulan Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas	Penguatan Skema Kegiatan Kinerja	Penguatan SPIP	Penguatan Jabatan Fungsional	Penguatan Jabatan Fungsional
		Penguatan RKT-RB	Penguatan Pengendalian Risiko	Penguatan Pelayanan Publik	Penguatan SPIP	Penguatan Pelayanan Publik
			Penguatan Jabatan Fungsional	Penguatan Jabatan Fungsional		
6	Tata Laksana	Penyusunan Rencana Strategis Terbaru Tahun 2025-2029	Pembuatan Mekanisme Kanal Pengumpulan Data Dukung Kinerja	Pengendalian Risiko	Pengendalian Risiko	Pengendalian Risiko
		Penyusunan Manajemen Risiko	Sosialisasi Peta Tanggung Jawab Kinerja	Optimalisasi kanal pengumpulan data	Optimalisasi kanal pengumpulan data	Optimalisasi kanal pengumpulan data
			Pengendalian Risiko	Optimalisasi SOP Pengaduan	Optimalisasi SOP Pengendalian Risiko	Optimalisasi SOP Pelayanan Publik



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN



BAB IV

RENCANA STRATEGIS



BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

A. MONITORING

Dalam rangka memastikan ketercapaian target kinerja secara terukur dan berkesinambungan, Lapas Kelas I Medan mengembangkan dan menerapkan suatu sistem monitoring capaian kinerja yang disusun secara terstruktur, terjadwal, dan terdokumentasi dengan baik. Sistem ini dirancang untuk menjadi instrumen pengawasan internal yang mampu memberikan gambaran menyeluruh terhadap progres pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana terlampir pada Buku Saku Peta Tanggung Jawab. Melalui pendekatan ini, Lapas Kelas I Medan memastikan bahwa setiap kegiatan operasional, pembinaan, pelayanan, serta dukungan manajemen berjalan selaras dengan target strategis yang telah ditetapkan dalam rentang waktu 2025–2029.

Adapun mekanisme evaluasi terhadap capaian kinerja Lapas Kelas I Medan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi Peta Tanggung Jawab Kinerja oleh Kepala Lapas kepada seluruh penanggung jawab kegiatan, termasuk penjelasan skema aktivitas dan alur pemenuhan masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana tercantum dalam Buku Saku Peta Tanggung Jawab IKK;
2. Penyelarasan pemahaman penanggung jawab kegiatan terhadap target, mekanisme pelaksanaan, serta kewajiban pelaporan data dukung setiap IKK;
3. Pembentukan mekanisme monitoring capaian kinerja yang terjadwal, meliputi pemantauan mingguan/bulanan, verifikasi data dukung, dan penilaian progres kegiatan;
4. Penyediaan kanal khusus untuk pengumpulan data dukung, sebagai media terpusat bagi setiap penanggung jawab kegiatan dalam mengunggah laporan, bukti pendukung, dan hasil pelaksanaan IKK sesuai peta tanggung jawab;

5. Penguatan sistem dokumentasi dan pelaporan guna memastikan seluruh data monitoring tercatat secara akurat, dapat ditelusuri, dan siap digunakan untuk evaluasi berkala; serta
6. Pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut capaian kinerja, termasuk penyampaian rekomendasi perbaikan serta peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing penanggung jawab.

Monitoring dilaksanakan tidak hanya sebagai mekanisme pencatatan progres, tetapi juga pengawasan terhadap pelaporan kegiatan. Dokumentasi hasil monitoring disusun secara sistematis sebagai bahan pengambilan keputusan, penyusunan laporan berkala (Mingguan, Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan), serta dasar perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan. Dengan demikian, sistem monitoring ini menjadi fondasi penting dalam upaya mewujudkan tata kelola kinerja yang efektif, transparan, dan akuntabel di lingkungan Lapas Kelas I Medan.

B. EVALUASI

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan monitoring kinerja, Lapas Kelas I Medan menerapkan mekanisme evaluasi berkala yang dilaksanakan secara sistematis dan terukur guna memastikan bahwa seluruh capaian kegiatan sejalan dengan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana tertuang dalam Buku Saku Peta Tanggung Jawab Kinerja. Evaluasi dilakukan oleh Kepala Lapas setiap tiga bulan sekali melalui proses pengkajian menyeluruh terhadap data capaian, kesesuaian pelaksanaan, efektivitas strategi, serta tingkat pemenuhan target kinerja masing-masing penanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, Kepala Lapas melakukan penilaian terhadap progres triwulanan, mengidentifikasi deviasi antara target dan realisasi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan untuk menjaga kesinambungan pencapaian kinerja.

Hasil evaluasi triwulanan ini tidak hanya menjadi dasar penyesuaian strategi atau perbaikan proses kerja, tetapi juga berfungsi sebagai bahan penguatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan tugas serta pelayanan masyarakat. Seluruh temuan dan rekomendasi dituangkan dalam dokumen evaluasi resmi yang kemudian disampaikan kepada para

penanggung jawab kegiatan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Dengan penerapan evaluasi yang terjadwal dan berbasis dokumen peta tanggung jawab, Lapas Kelas I Medan memastikan bahwa pelaksanaan kinerja berlangsung adaptif, responsif, dan selaras dengan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

C. PENGENDALIAN

Dalam rangka memastikan pencapaian kinerja yang efektif, efisien, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Lapas Kelas I Medan menerapkan mekanisme pengendalian capaian kinerja melalui prosedur yang terstruktur dan berkesinambungan.

Adapun prosedur pengendalian capaian kinerja Lapas Kelas I Medan adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian ini diawali dengan pembentukan Tim Pengendalian Capaian Kinerja yang bertugas melakukan pemantauan, analisis, serta tindak lanjut terhadap seluruh perkembangan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Tim ini berfungsi sebagai unit pengawas internal yang memastikan agar setiap penanggung jawab kegiatan bekerja sesuai dengan ketentuan, jadwal, serta standar hasil yang tercantum dalam Buku Saku Peta Tanggung Jawab Kinerja;
2. Sebagai bentuk penguatan fungsi pengendalian, Kepala Lapas memiliki kewenangan untuk memberikan teguran resmi kepada pejabat penanggung jawab IKK yang tidak mencapai target, tidak menyampaikan laporan capaian, atau tidak melengkapi data dukung sebagaimana dipersyaratkan. Teguran tersebut menjadi instrumen pembinaan sekaligus dorongan agar setiap penanggung jawab mempercepat pemenuhan kewajibannya dan melakukan tindakan korektif;
3. Selain itu, hasil pengendalian akan didokumentasikan dan dilaporkan secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan integritas proses pencapaian kinerja.

Dengan penerapan prosedur pengendalian yang jelas dan tegas ini, Lapas Kelas I Medan memastikan bahwa seluruh target kinerja dapat dicapai secara

konsisten serta selaras dengan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN



BAB V

RENCANA STRATEGIS



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang memberikan arah, kerangka kerja, dan landasan pelaksanaan tugas pemasyarakatan dalam lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini secara substansial mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2025–2029 sebagai induk kebijakan teknis pemasyarakatan, sehingga setiap tujuan, sasaran, indikator, dan strategi yang ditetapkan selaras dengan arah pembangunan nasional sektor pemasyarakatan serta mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Melalui Renstra ini, Lapas Kelas I Medan menegaskan komitmennya untuk menyelenggarakan pembinaan, pelayanan, pengamanan, serta peningkatan kapasitas organisasi secara profesional, berintegritas, akuntabel, dan berkelanjutan.

Renstra ini juga menjadi pedoman bagi seluruh unsur pelaksana di Lapas Kelas I Medan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, memperkuat sinergi antarbagian, serta memastikan akuntabilitas setiap program dan kegiatan. Dengan tersusunnya strategi, indikator kinerja, peta tanggung jawab, dan mekanisme monitoring evaluasi–pengendalian yang jelas, Lapas Kelas I Medan diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan pemasyarakatan secara lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika tantangan operasional maupun tuntutan layanan publik.

Melalui pelaksanaan Renstra ini, Lapas Kelas I Medan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembinaan kepribadian dan kemandirian Warga Binaan, memperkuat layanan kesehatan, menjamin keamanan dan ketertiban, memodernisasi tata kelola berbasis teknologi informasi, serta memperbaiki sarana dan prasarana agar memenuhi standar pemasyarakatan yang layak. Selain itu, Renstra ini menjadi pijakan penting bagi upaya mewujudkan penyelenggaraan pemasyarakatan yang transparan, humanis, dan berorientasi pada pemenuhan hak Warga Binaan serta kepuasan masyarakat.

Dengan demikian, Renstra Lapas Kelas I Medan Tahun 2025–2029 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga komitmen nyata untuk menghadirkan transformasi layanan pemasyarakatan yang lebih modern, bertanggung jawab, dan berdaya guna. Lapas Kelas I Medan bertekad memberikan

kontribusi signifikan dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang semakin maju serta berperan aktif dalam pencapaian target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.